

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Evi Mulyati¹, Muhamad Rifandi², Choirul Anam³

^{1,2,3}Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: muhamadrifandi@unisayogya.ac.id

Article History:

Received: 27 Mei 2023

Revised: 31 Mei 2023

Accepted: 02 Juni 2023

Keywords:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan perolehan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 kali berturut-turut dari BPK. Akan tetapi masih ada beberapa catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu Piutang retribusi dan pajak reklame, pengelolaan tenaga kerja BPJS dan beberapa catatan mengenai pembangunan. Jenis penelitian kuantitatif dan metode purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini pegawai bagian pengelola keuangan, bendahara atau staf pembantu bagian keuangan di OPD Kota Yogyakarta berjumlah 27 instansi dengan responden sebanyak 101. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal berpengaruh, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dimana entitas pelaporan harus menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dalam PP No 8 tahun 2006 menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan merupakan gambaran untuk mengetahui apakah dalam suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat bermanfaat dalam upaya pelaksanaan program pemerintahan di masa yang akan datang. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang wajib disajikan dengan kualitas yang baik, begitu banyak yang masih mengandalkan suatu informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintahan daerah dengan kepentingan yang berbeda Ikriyati (2019). Menurut PP No 71 Tahun 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah. Kualitas laporan keuangan adalah suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yaitu: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat Dipahami.

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan menjadi topik yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya. Pelaporan keuangan yang berkualitas harus dibuat dengan prinsip dan aturan yang terdapat pada standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan pemerintah daerah wajib mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAP) yang telah ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan memuat prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah (Marini, 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah yang bagus juga sangat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah bisa menjadi penyebab sulitnya mendeteksi kecurangan maupun tidak akuratnya proses akuntansi menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian internal menyediakan sebuah informasi untuk menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Ayu dkk, 2020).

Sumber daya manusia yang berkompeten bisa dikatakan bertanggung jawab jika sudah melakukan tugas yang dikelolanya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar juga membuat laporan keuangan relevan dan andal, sehingga akan semakin baik kompetensi sumber daya manusia (Ardianto, 2019). Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan teknologi Informasi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang dimana sebelumnya proses akuntansi dilakukan secara manual dan sekarang dapat dilakukan secara komputerisasi dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan komputerisasi sekarang sudah didukung dengan adanya penggunaan aplikasi (*software*) yang diharapkan bisa mengurangi kesalahan pencatatan.

LANDASAN TEORI

Kualitas laporan keuangan

Laporan Keuangan akan dikatakan berkualitas jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dipahami dan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam pengambilan keputusan. ada empat karakteristik pelaporan keuangan pemerintah untuk mencapai kualitas yang diinginkan. 1) Relevan Jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan anda dengan

mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan. 2) Andal Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang ada secara jujur, serta dapat diverifikasi. 3) Dapat dibandingkan Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas pelaporan lain pada umumnya. 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna dan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah penggunaan dalam prinsip-prinsip aturan akuntan pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Ardianto & Eforis, 2019). Pernyataan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP nomor 1 sampai nomor 12 yaitu: No. 1 tentang penyajian laporan keuangan, No. 2 tentang realisasi anggaran, No. 3 tentang laporan arus kas, No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan, No. 5 tentang akuntansi persediaan, No. 6 tentang akuntansi investasi, No. 7 tentang akuntansi aset tetap, No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, No. 9 tentang akuntansi kewajiban, No. 10 tentang koreksi kesalahan, No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, No. 12 Laporan operasional. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pencatatan laporan keuangan menjadi transparan dan akrual, sehingga bisa meningkatkan hasil kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah tindakan dan kegiatan dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk menciptakan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dan memastikan atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Marini, 2018). Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2019).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya yang di miliki oleh seseorang. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang memungkinkannya melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan tidak baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan berdasarkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan (Parti, 2021). Menurut Khairunnas (2021) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan ilmu pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup. ada 3 komponen utama untuk membentuk kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu yaitu: pengetahuan, kemampuan, sikap.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah penggunaan komputer dan jaringan yang disederhanakan secara optimal oleh manusia untuk mempercepat tugas dan meningkatkan kinerja Alminanda & Marfuah (2018). Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menjelaskan bahwa pada pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju untuk meningkatkan kemampuan

dalam mengelola keuangan daerah, dan memberikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Dan manfaat kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, dengan memberikan semua pihak kesempatan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan cepat dan akurat (Rifandi, 2018).

Rumusan Hipotesis

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H2: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala untuk meneliti suatu populasi dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer, data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber atau subyek penelitian melalui angket yang disebar. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuisioner yang di antar dan diambil sendiri oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah staf-staf bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada di masing-masing dinas, badan, inspektorat, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui sejauh mana kevalidan suatu pernyataan dari penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel data (n) sebanyak 101 responden, dan $df = (n-2)$ sehingga diperoleh $df = 99$ dan $\alpha = 0,005$ maka di dapatkan r tabel = 0,2552. dilihat dari nilai r hitungnya $>$ dari nilai r tabel (0,2552) sehingga disimpulkan pada instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas jika pada jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu terhadap pertanyaan, maka akan semakin reliabilitas jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai dari *Cronbach Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari batasan *uji reliabilitas* yaitu 0,60. Nilai tersebut memberikan arti bahwa indikator-indikator variabel dikatakan *reliabel* yang artinya indikator-indikator tersebut memiliki konsistensi dalam mengukur variabel Penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). dalam dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan exact test *Monte Carlo* adalah a) apakah signifikansi di atas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		101	
Normal Parameters A ^b	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,79596135	
Most Extreme Differences	Absolute	,132	
	Positive	,132	
	Negative	-,120	
Test Statistic		,132	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,056 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,050
		Upper Bound	,062

Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

Hasil dari pengujian normalitas yang menggunakan *kolmogorov-smirnov* menunjukkan signifikansi hasil sebesar 0,062 seperti terlihat pada tabel diatas dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah H_0 diterima yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas dalam suatu penelitian. Uji multikolinearitas bisa dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan dilihat dari nilai tolerance. Jika $VIF < 10$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas Ghozali (2018). Hasil uji multikolinieritas diatas semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. hasil dari uji multikolinieritas pada semua variabel bebas Berdasarkan tabel diatas diketahui pada bagian coefficient terlihat nilai VIF untuk semua variabel tidak melebihi nilai < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dari itu variabel penelitian dianggap bebas dari gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga sudah memenuhi syarat analisis data.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan model regresi atau terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan lain (Ghozali, 2018). Hasil dari pengelolaan heterokedastisitas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi dari hasil uji heteroskedastisitas di atas secara keseluruhan memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ yang artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

Uji Koefisien Determinasi R²

Uji R² digunakan untuk menginvestigasi kemampuan model dalam menjelaskan hasil variabel dependen. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penjelasan hasil dari variabel terikat (Ghozali, 2018). Hasil analisis koefisien determinasi (R²) diketahui bahwa nilai signifikansi dari Adjusted R square yaitu 0,684 yang artinya kemampuan variabel

independen (bebas) dalam menjelaskan variabel dependen (terikat) adalah sebesar 68,4 % sisanya 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	2,294	2,184
	Persepsi PSAP	,225	,055
	Persepsi PI	,142	,068
	Persepsi KSDM	,124	,055
	Persepsi PTI	,312	,073

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e$$

$$Y = 2,294 + 0,225 X_1 + 0,142 X_2 + 0,124 X_3 + 0,312 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
 X1 : Penerapan SAP
 X2 : Pengendalian Internal
 X3 : Kompetensi SDM
 X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

Uji Statistik t

Tabel 3. Hasil Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
Constant	2,294	2,184		1,050	,296
PSAP	,225	,055	,337	4,100	,000
PI	,142	,068	,184	2,087	,040
KSDM	,124	,055	,174	2,260	,026
PTI	,312	,073	,307	4,308	,000

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

- Berdasarkan tabel hasil dari uji t menerangkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,100 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 1.984 dan nilai signifikan variabel penerapan standar akuntansi menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Berdasarkan tabel hasil dari uji t menerangkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,087 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 1.984 dan nilai signifikan variabel pengendalian internal menunjukkan $0,040 < 0,05$ yang berarti pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Berdasarkan tabel hasil dari uji t menerangkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,260 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 1.984 dan nilai signifikan variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan $0,026 < 0,05$ yang berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Berdasarkan tabel hasil dari uji t menerangkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,308 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 1.984 dan nilai signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan $0,000 < 0,05$ yang berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan ini laporan keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dan ini akan menjadikan laporan keuangan pemerintah menjadi berkualitas karena semua transaksi laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah yang baik sesuai UU pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat ditingkatkan Marini (2018).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yanti (2020) dan Nurhasanah (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian Internal

Hasil penelitian pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa pengendalian internal terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal berfungsi untuk memberikan keyakinan bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. sehingga pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas informasi dan mencegah ketidak serasian dan memudahkan proses audit laporan keuangan (Wulandari, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal pemerintah maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Wulandari (2020) dan Ikriyati (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian Hasanah (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi SDM

hasil penelitian pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam penyusunan laporan keuangan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memenuhi standar kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan karena sumber daya manusia berperan aktif dalam operasional organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurhasanah (2018) dan Ayu (2020) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian Khairunnas (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah proses menggunakan komputer untuk pemrosesan data yang dilengkapi oleh jaringan internet untuk mengakses perangkat lainnya, dan memproses data menjadi suatu informasi. Berdasarkan peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 mengenai proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik, pemerintah diharuskan memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah. ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah mengandalkan kemajuan teknologi informasi yang digunakan (Eklesia, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ridzal (2022) dan Marfuah (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Nasrullah (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi, pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENGAKUAN

Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah un. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 113–126. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.555>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Eklesia, R., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Urnal Riset Akuntansi*, 13(04), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal

- Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Khairunnas. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 483–497.
- Marfuah. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Marini, S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 128–139. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26468>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (E. S. Su (ed.); Salemba 4).
- Nurhasanah, & Firmasnyahi, K. sari. (2018). Pengaruh Penerapan standar Akuntansi, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumater Selatan. *Jurnal Akuntanika*, 4(3), 121.
- Parti, H. G. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Manado. *Jurnal Emba*, 9(2), 1063–1075.
- Republik, I. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Daerah*.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Rifandi, M. (2018). *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. XIV(02), 48–61.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, R&D*. alfabeta.
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal Of Accounting and Financial*, 5(1), 1–12. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/633>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>